

**PEMBERIAN SURAT REKOMENDASI GUBERNUR UNTUK
PEMBANGUNAN *CONDOTEL* DI KAWASAN BANDUNG UTARA**

Nama : Allesia Zepani
Fakultas/Program Studi : Hukum / Ilmu Hukum
Pembimbing : Dr. H. Taufik Iman Santoso, S.H., M.Hum.
Nabbilah Amir, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penulisan hukum ini dilakukan dengan metode yuridis normatif yang bertujuan untuk mengetahui apakah dalam pemanfaatan ruang Kawasan Bandung Utara dan pada penerapan izin di Kawasan Bandung Utara terdapat banyak kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap apa yang sudah diatur oleh Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016. Sahid *Cleveland Condotel* (SCC) yang berlokasi di Jalan Bukit Idaman Nomor 16, Ledeng, Cidadap, Kota Bandung merupakan proyek yang dikembangkan oleh PT. Tri Kurnia Sejahtera (PT TKS) dibangun pada zona lindung dan kawasan lindung di Kawasan Bandung Utara yang berada satu hamparan yang berjarak 7 meter dari mata air Cibadak, sementara radius seharusnya adalah 200 meter dari lokasi mata air tersebut. Terdapat suatu kejanggalan dalam proses perizinan yaitu pada saat Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) belum selesai dibahas, PT TKS berhasil mengantongi dokumen Kerangka Keterangan Kota (KRK) dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Pemberian surat rekomendasi gubernur untuk pembangunan *Condotel* di Kawasan Bandung Utara tidak sesuai dengan ketentuan Undang Undang Penataan Ruang dan tindakan pemerintah provinsi Jawa Barat melakukan pembatalan telah sesuai dengan ketentuan sanksi administratif menurut Pasal 63 huruf (f) Undang Undang No. 26 tahun 2007 yaitu pembatalan izin yang dalam hal ini merupakan pembatalan surat rekomendasi gubernur untuk memenuhi salah satu syarat izin pemanfaatan ruang Kawasan Bandung Utara. Perlu adanya peran pemerintah agar dapat melakukan filterisasi pemberian izin dan penerapan tindak yang tegas dari pemerintah dalam menanggulangi permasalahan penataan ruang di Kawasan Bandung Utara agar dalam pemberian izin dan agar pemberian surat rekomendasi tepat sasaran serta tidak bertentangan dengan peraturan yang telah ada.

Kata Kunci: Rencana Detail Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, Surat Rekomendasi

THE GOVERNOR'S RECOMMENDATION LETTER FOR CONDOTEL CONSTRUCTION IN NORTH BANDUNG AREA

Nama : Allesia Zepani
Fakultas/Program Studi : Hukum / Ilmu Hukum
Pembimbing : Dr. H. Taufik Iman Santoso, S.H., M.Hum.
Nabbilah Amir, S.H., M.H.

ABSTRACT

The writing of this thesis is done by normative juridical method which aims to find out whether in the utilization of the North Bandung Area and in the application of permits in the North Bandung Area there are many conformities or non-conformities. Utilization of space in the North Bandung Area must obtain a Governor's recommendation and a permit for the use of space from the regent or mayor. However, the application of permits in the North Bandung Area has a lot of discrepancies with West Java Regional Regulation No. 2 of 2016 that has been regulated, especially related to issues that require the governor's recommendation requirements as one of the requirements in granting permits for the use of space in the North Bandung Area. Sahid Cleveland Condotel (SCC) located at Jalan Bukit Idaman Number 16, Ledeng, Cidadap, Bandung City is a project developed by PT. Tri Kurnia Sejahtera (PT TKS) which was built in a protected zone and protected area in the North Bandung Area which is one stretch within 7 meters of the Cibadak spring, while the radius should be 200 meters from the location of the spring. When the Spatial Detail Plan (RDTR) has not yet been fully discussed, PT TKS has succeeded in pocketing the City Information Framework (K RK) document from the Bandung City Government. The Governor's recommendation letter for the Condotel Construction in the North Bandung Area is not in accordance with the provisions of the Spatial Planning Law and the actions of the West Java provincial government to cancel it in accordance with the provisions of administrative sanctions according to Article 63 letter (f) of Law No. 26 of 2007 namely the cancellation of permits which in this case is the cancellation of the governor's recommendation letter to fulfill one of the permits for the use of the North Bandung area. The role of the government is needed in order to be able to filter the granting of permits and to apply strict action from the government in overcoming the problem of spatial planning in the North Bandung Area so that in granting permits and so that the granting of recommendations is right on target and does not conflict with existing regulations.

Keywords: Spatial Detail Plan, Space Utilization, Recommendation Letter